

Implementasi Kebijakan Penertiban Pkl (Studi Pada Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto)

Rizky Aryudha¹, Arif Darmawan², Achluddin Ibnu Rochim³

^{1,2,3}Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Rizkyaryudha@gmail.com¹, arif@untag-sby.ac.id², didin@untag-sby.ac.id³

Abstract

Street vendors (PKL) are a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia. The case of street vendors is considered by many parties as a form of the government's failure to provide job opportunities for the poor. The aims of this research are: 1. Knowing and explaining the implementation of the policy for controlling street vendors has been effectively implemented on Jalan Benteng Pancasila, Mojokerto City, 2. Knowing and explaining the effectiveness of the policy for controlling street vendors on Jalan Benteng Pancasila, Mojokerto City. The results of this study provide the fact that the existence of street vendors in Mojokerto City has caused many problems, including making the city disorganized, dirty and causing congestion. So far, control measures have been carried out by the Satpol PP apparatus. The conclusion obtained in this study is that the control of street vendors (PKL) in Mojokerto City so far has not been running optimally. This is due to several factors, such as: (1) There is no strict punishment for street vendors who still sell on the roadside (2) Mojokerto City Government has not been consistent and unified in responding to the existence of street vendors.

Keywords: *Implementation, Control and Street Vendors, PKL*

Abstrak

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui dan menjelaskan penerapan kebijakan penertiban PKL sudah efektif dilaksanakan di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto, 2. Mengetahui dan menjelaskan efektivitas kebijakan penertiban PKL di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa Keberadaan PKL di Kota Mojokerto selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya membuat kota menjadi tidak tertib, kotor dan menimbulkan kemacetan. Selama ini tindakan penertiban telah dilakukan oleh aparat Satpol PP. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan (2) Pemerintah Kota Mojokerto belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL.

Kata Kunci : Implementasi, Penertiban dan Pedagang Kaki Lima

Pendahuluan

Thomas R. Dye, dalam “*Understanding publik policy*”, 1987, menyatakan bahwa *public policy* itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever goverment chooses to do or not to do*), dengan kata lain. Isi *public policy* itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah; termasuk misalnya “mengatur konflik” tegasnya, *public policy* itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam hal ini kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah akan diterapkan (Raharjo, 2019). Sehingga proses kebijakan berpengaruh kepada kepentingan umum melalui implementasi/penerapan suatu kebijakan publik. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang tetapi juga dapat berbentuk keputusan eksekutif atau pengadilan yang penting. Idealnya keputusan identitas masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang akan dicapai dan dalam berbagai cara, struktur proses implementasi. Dari sini kebijakan publik yang akan dibahas yaitu perda pasal 64 nomer 3 tahun 2021 yang mengatur larangan untuk PKL (pedagang kaki lima) terkait hal hal yang sudah ditetapkan perda.tujuan dari pembuatan perda tentang mengatur atau menertibkan PKL, tentunya memiliki tujuan yang pasti yaitu demi kepentingan umum. Tujuan tersebut dengan harapan yang baik membantu memperlancar lalu lintas serta mengurangi keresahan pengendara yang akan lewat. Ditambah memberikan masalah pencemaran lingkungan terkait sampah dari penjualan yang dilakukan PKL (Abdoellah, Awan Y. and Rusfiana, 2016).

Akan tetapi dalam penerapan suatu kebijakan terdapat gap implementasi, yang artinya bahwa pemerintah telah tidak efektif dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat (Perda pasal 64 Nomer 3 Tahun 2021 mengatur larangan penjualan PKL) agar tertib tempat usaha (Permana, 2017). Adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan yang telah diterapkan. Pelaksanaan secara nyata, banyak PKL yang berjualan di badan/tepi jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Dengan begini suatu kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan tidak dapat mencapai harapan. Sehingga penerapan tidak sampai kepada kepentingan umum yaitu menertibkan tempat usaha. Disini lah pentingnya pembahasan yang akan dilakukan apakah dengan permasalahan muncul. Efektivitas tentang penerapan Kebijakan Penertiban PKL berupa Perda Nomer 3 Tahun 2021 dapat dicapai sesuai harapan ataukah malah jauh dari harapan yang ada. Maka dari itu, perlunya diangkat menjadi sebuah permasalahan yang ada. Tidak hanya perlu tetapi juga sangat penting untuk diangkat. Karena mempengaruhi kepentingan umum (masyarakat) dalam kehidupan sehari – hari (Damara, 2020).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti melakukan pendekatan kualitatif adalah untuk menganalisis terkait pengelolaan pedagang kaki lima di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto dengan mencari informasi kepada pihak yang bersangkutan terkait manajemen pengelolaan dan penertiban pedagang kaki lima dalam meningkatkan ekonomi daerah sekitar Jalan Benteng Pancasila Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan. peneliti akan mengumpulkan data dari para informan (kelompok pedagang kaki lima yang berjualan di area Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto

tentang bagaimana manajemen pengelolaan, dan tingkat ekonomi dari awal hingga saat ini seperti apa, yang diterapkan didalam kelompok pedagang kaki lima ini.

Sumber Data

Sumber data merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung oleh informan atau narasumber yang dianggap mengetahui secara jelas tentang fokus penelitian yang di teliti. Dalam penelitian ini peniliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder

Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi dan wawancara langsung dengan pedagang kaki lima beserta pengunjung yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa dokumen serta laporan tertulis diluar lokasi penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menggunakan Teknik pengumpulan Data :

1. Observasi

untuk mengamati data empiris dilapangan serta melakukan pencatatan. Langsung mendatangi lokasi penelitian untuk melihat cara dalam mengatur para pedagang kaki lima.

2. Wawancara

Teknik pengumpulandata yang dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi lokasi pedagang di Benteng Pancasila Kota Mojokerto untuk memperoleh data tentang strategi dalam mengatur para pedagang kaki lima.

Teknik Analisis Data

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan, observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (dalam Manurung, 2005:89) yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas memperpendek dan membuang hal-hal yangtidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah di kendalikan. Data yang di reduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang di peroleh apabila diperlukan.

2. Sajian data (*Data Display*)

Sajian Data dalah susunan informasi yang memungkinkandapat ditariknya sesuatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti dengan mencatat semua penjelasan dan alur sebab akibat secara menyeluruh dari awal sampai akhir.

Hasil Penelitian

Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah objek publik terdapat di wilayah metropolitan terbesar di Indonesia. Keberadaan pedagang masa kini dipandang oleh sejumlah sisi terhadap satu komponen dari kesalahan pihak berwajib menyuplai tenaga kerja terhadap masyarakat kurang mampu. Sedangkan pedagang berjualan disepanjang jalan benteng pancasila ialah lokasi cocok dalam perdagangan disepanjang jalan benteng pancasila. Sejumlah pedagang beralih dari Benteng Pancasila ke taman Mojokerto. namun sekarang penuh penjual bertambah di lokasi tidak strategi untuk berdagang. Pedagang disekitar jalan benteng pancasila adalah penjual kecil. Mulai waktu kedepan penuh populasi penjual yang ada. Tentunya semakin banyaknya pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan akan membuat bentuk Kota Mojokerto menjadi tidak beraturan dan serta berdampak menyalahi suatu aturan telah ditetapkan kepada pihak berwajib. Keberadaan PKL di jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto tampak selalu bertumbuh dari tiap dekade hingga saat ini.

Pembahasan

Penerapan adalah suatu bagian operasi ketetapan negara mempunyai penuh arti. Penerapan ketetapan yaitu suatu hal wajib, justru sangat wajib untuk rancangan baik dengan pola imajinasi akan terselip teratur pada data jika tak diterapkan. Penerapan ketetapan asli tidaklah hanya sekedar mempersangkutan oleh metode penjelasan ketentuan hukum ke dalam metode yang selalu melewati jalan pemerintah, mempersoalkan yang bertambah, implementasi kebijakan tertahan, keputusan, pertikaian serta apa saja yang menerima sejumlah ketetapan. Winarno dalam Limbong (2006:190) menerangkan jika ketetapan aturan merupakan sistem yang menerapkan serta melaksanakan ketetapan sesudah aturan yang ditetapkan agar mewujudkan pengeluaran tersebut.

Berkembangnya populasi Pedagang yang ada di kota metropolitan di Indonesia menumbuhkan suatu kesalahan. Persoalan Pedagang dilema bagi semua pihak, di satu sisi Pedagang Kaki Lima andaikan suatu sarana perdagangan yang sebagian besar masyarakat mendapatkan penghasilan dengan berjualan, di sisi lain Pedagang dapat melaksanakan penjualan menjadi tidak beraturan. Beragam ketetapan dan peraturan telah diciptakan dalam rangka mengatur keberadaan Pedagang, akan tetapi area Pedagang masih enggan akan kedisiplinan yang tentram. Implementasi peraturan kedisiplinan di lokasi kadang kala memperoleh beragam masalah, baik yang ada dari lingkungan masyarakat ataupun pemerintah asalkan perwujudan prosedur Pedagang.

Di area jalan Benteng Pancasila yaitu salah satu kota Mojokerto yang sering dijumpai para pedagang diarea tersebut. Dari hasil riset di lokasi kesanggupan Pedagang di lokasi Benteng Pancasila terlihat tetap mengalami peningkatan pedagang mulai tahun demi tahun berlanjut. Bisa kita lihat disepanjang jalan utama di Benteng Pancasila yang banyak dijumpai Pedagang Kaki Lima. Kesanggupan Pedagang di area Benteng Pancasila ini terus memunculkan pola pikir yang berbeda di antara masyarakat sekitar. Muncul pemikiran dari masyarakat tentang bekerja sebagai Pedagang itu hal baik karena menjauhkan dari maraknya pengangguran bagi masyarakat, sering kala memandang aktivitas informal yang menggaduhkan ketertiban pengguna jalan sekitar.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut; Menurut riset analisis, yang saya sampaikan pada bab sebelumnya dan dirangkum pada kesimpulan ini:

1. Berdasarkan penelitian implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Benteng Pancasila Mojokerto belum dapat dikatakan berhasil hal ini dibuktikan dengan para Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di Jl. Benteng Pancasila Mojokerto
2. Ada beberapa faktor melawan ketetapan kedisiplinan pedagang di area Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto, yaitu :
 - a) Petugas yang menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Benteng Pancasila Mojokerto masih belum memberikan sanksi yang akan membuat jera.
 - b) Pemerintah Kota Mojokerto belum membuat kebijakan yang pasti dalam menyikapi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Benteng Pancasila Mojokerto.

Saran

Menurut riset analisis, Saya mengutarakan gagasan mudah diaplikasikan sebagai perubahan di periode baru ini:

1. Agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat taat mengikuti peraturan, perlunya diberikan sanksi yang tegas bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar (seperti membayar denda atau mengambil barang tanpa di kembalikan)
2. Perlunya kerjasama antara WH, Dinas Perhubungan dan Instansi DPKKD dengan Kantor Satpol PP untuk menanggulangi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Benteng Pancasila dan segera menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan Y. and Rusfiana, Y. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Damara, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 1–16.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Permana, E. (2017). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten*. 698–710.
- Raharjo, P. (2019). *Peranan Kinerja Anggota Suku Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Jalan Raya Ciledug Pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan*. 3(1).